



## Analisis Kinerja Keuangan Daerah Ditinjau dari Efisiensi dan Pertumbuhan Belanja pada Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 – 2024

Angel Merlyn Pattimahu<sup>1</sup>, Diar Muzna Tangke<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan, Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon

<sup>1</sup>angelpattimahu25@gmail.com, <sup>2</sup>diartangke@gmail.com

### ABSTRACT

*Regional governments have greater authority in managing their budget revenues and expenditures. Regional expenditure represents an obligation recognized as a deduction from net assets within a fiscal year. These funds are allocated to support the implementation of governmental functions at the provincial and municipal levels. This study aims to assess the efficiency level and expenditure growth of the Ambon City Government. The research employs a descriptive method with a focus on the Regional Financial and Asset Management Agency of Ambon City. Based on the analysis of expenditure efficiency ratios, the results show that efficiency fluctuated over the study period: 92.66% in 2022, increasing to 99.53% in 2023, and declining again to 86.63% in 2024. Meanwhile, expenditure growth also showed an unstable pattern, with –2.58% in 2022, rising to 7.26% in 2023, and decreasing again to –7.01% in 2024. These findings indicate dynamic fiscal management influenced by development priorities and the government's fiscal capacity. Overall, the study highlights the importance of effective and consistent budget planning to maintain efficiency and support the achievement of regional development goals.*

**Keywords:** Local Government Expenditure, Efficiency, Assets, Budget, Expenditure Growth

**Received by the Editorial Team: 14-11-2025 | Revised Completed: 19-12-2025 | Published Online: 27-12-2025**

### 1. Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola keuangan daerah guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mengacu pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui APBD, pemerintah daerah dapat merencanakan serta melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas daerah. [1] Kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Oleh karena itu analisis kinerja keuangan daerah menjadi sangat relevan sebagai alat evaluasi atas pelaksanaan kebijakan fiskal daerah.

Salah satu aspek penting dalam menilai kinerja keuangan daerah adalah belanja daerah. Belanja daerah merupakan komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah (Brigham, 2021). Menurut [2], belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat menurunkan saldo anggaran lebih dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Belanja daerah tersebut mencerminkan kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, [3] Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mendefinisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran kas daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran, baik yang bersifat rutin maupun investasi, yang manfaatnya secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam [4] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. SAP juga mengatur bahwa belanja daerah diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi untuk memudahkan pengendalian, pelaporan, dan analisis kinerja keuangan daerah.

Klasifikasi belanja daerah menurut SAP terdiri atas klasifikasi ekonomi (jenis belanja), klasifikasi menurut organisasi, dan klasifikasi menurut fungsi. Klasifikasi ekonomi merupakan pengelompokan belanja berdasarkan jenis belanja yang digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas. Untuk pemerintah daerah, klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan tak terduga.

Klasifikasi belanja menurut organisasi merupakan pengelompokan belanja berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Dalam hal ini, belanja daerah disusun berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, baik berupa uang maupun barang. Sementara itu, klasifikasi belanja menurut fungsi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi ini menunjukkan peruntukan belanja daerah sesuai dengan fungsi pemerintahan, seperti pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan fungsi lainnya, sehingga dapat digunakan untuk menilai prioritas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan belanja daerah.

Realisasi anggaran belanja disajikan berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran daerah. Penyusunan akuntansi belanja tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian manajemen guna menilai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Menurut Mahsun, et al 2011 pengelompokan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan urusan pemerintahan serta program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi belanja daerah memiliki peran penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, karena memungkinkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai sejauh mana realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui klasifikasi ini,

pemerintah dapat mengidentifikasi proporsi belanja yang dialokasikan untuk kegiatan rutin dan pembangunan, serta melakukan evaluasi terhadap prioritas kebijakan fiskal yang telah diterapkan.

Oleh karena itu, analisis terhadap efisiensi belanja daerah menjadi penting untuk menilai apakah penggunaan anggaran telah dilakukan secara optimal dan memberikan hasil yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi belanja menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana secara hemat, tepat sasaran, dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan.

Selain efisiensi, pertumbuhan belanja juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah. Pertumbuhan belanja menunjukkan dinamika peningkatan atau penurunan pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun yang dapat mencerminkan kebijakan fiskal daerah serta kondisi ekonomi daerah secara umum. Analisis pertumbuhan belanja dapat memberikan gambaran mengenai arah dan pola kebijakan belanja yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu.

Pemerintah Kota Ambon sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Maluku memiliki tantangan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Melalui analisis efisiensi dan pertumbuhan belanja, dapat diketahui sejauh mana Pemerintah Kota Ambon mampu memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Ambon yang ditinjau dari tingkat efisiensi dan pertumbuhan belanja selama tahun anggaran 2022–2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan sektor publik.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menjelaskan karakteristik data, seperti nilai rata-rata, persentase, rasio, dan kecenderungan data [6]. Metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai suatu fenomena atau variabel menggunakan data numerik. Pendekatan ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis sebab-akibat, melainkan untuk memberikan gambaran objektif dan terukur tentang kondisi yang sedang berlangsung.

Untuk memperoleh data yang valid dan terpercaya, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi,

dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya, guna menjawab seluruh permasalahan serta mencapai tujuan penelitian, digunakan metode analisis rasio efisiensi dan analisis pertumbuhan belanja.

- Analisis Rasio Efisiensi

(D. Kartika, 2015) Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara input dan output. Suatu kegiatan dinilai efisien apabila dapat menghasilkan output tertentu dengan input yang lebih sedikit atau dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Dengan kata lain, rasio efisiensi belanja digunakan sebagai alat untuk menilai tingkat efektivitas pemerintah dalam menghemat penggunaan anggaran. Hasil dari rasio ini bersifat relatif, bukan nilai tetap, sehingga tidak terdapat ukuran standar yang dapat menentukan apakah suatu tingkat efisiensi tergolong baik atau tidak. Pemerintah daerah dinilai sudah melakukan efisiensi anggaran ketika rasio efisiensinya berada diangka dibawah 100%. Begitupun sebaliknya jika terindikasi diatas 100% berarti adanya pemorosan anggaran. [2] merumuskan rasio efisiensi belanja sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

- Analisis Pertumbuhan Belanja

Menurut [2] Pertumbuhan belanja menggambarkan tingkat perubahan pengeluaran pemerintah antar periode anggaran. Analisis ini berguna untuk melihat kecenderungan alokasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, dan konsistensi dengan target pembangunan daerah. Analisis pertumbuhan belanja merupakan alat penting dalam evaluasi kinerja keuangan daerah yang bertujuan untuk menilai sejauh mana perubahan pengeluaran pemerintah mencerminkan efisiensi, efektivitas, dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan. Pertumbuhan belanja yang proporsional menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik yang sehat, sedangkan pertumbuhan yang berlebihan tanpa peningkatan output yang sepadan dapat mengindikasikan rendahnya efisiensi dan potensi pemborosan anggaran. Mardiasmo (2018) merumuskan pertumbuhan belanja sebagai berikut:

*Tingkat Pertumbuhan Belanja =*

$$\frac{\text{Belanja tahun ini} - \text{Belanja tahun lalu}}{\text{Belanja Tahun lalu}} \times 100\%$$

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Ambon

untuk periode tahun 2022 hingga 2024. Laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Melalui laporan realisasi belanja, dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD setiap tahunnya. Analisis terhadap laporan ini penting dilakukan karena mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar untuk menilai kinerja fiskal daerah serta kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Analisis terhadap laporan realisasi belanja Pemerintah Kota Ambon tahun 2022–2024 dimaksudkan untuk mengidentifikasi pola perubahan dan pertumbuhan belanja dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Melalui analisis tersebut, dapat diketahui bagaimana tren penggunaan anggaran daerah, termasuk apakah terjadi peningkatan atau penurunan belanja di berbagai pos pengeluaran. Hasil analisis ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efisien serta sejauh mana belanja yang dilakukan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, kajian terhadap laporan realisasi belanja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Ambon dalam merumuskan kebijakan pengelolaan anggaran pada periode selanjutnya agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil

##### Analisis Efisiensi Belanja

Tabel 1  
Data Realisasi Total Belanja Tahun 2022-2024

N o	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2022	1.198.549.548.597,18	1.110.263.638.646,00
2	2023	1.196.520.683.700,00	1.190.899.358.283,81
3	2024	1.278.797.555.252,11	1.107.398.393.879,00

Sumber: BPKAD Kota Ambon, 2025

Dari tabel di atas termuat anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja tiga tahun terakhir yaitu tahun 2022, 2023 dan 2024 kota Ambon. Dapat dihitung rasio efisiensi Belanja sebagai berikut:

- Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2022:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.110.263.638.646,00}{1.198.549.548.597,18} \times 100\% \\ = 92,66\%$$

Jadi, dari total anggaran belanja di tahun 2022, pemerintah kota ambon berhasil merealisasikan sebesar 92,66% artinya pemerintah kota ambon berhasil menghemat sekitar 7,34% dari total anggaran belanja tahun 2022.

- Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2023:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.190.899.358.283,81}{1.196.520.683.700,00} \times 100\% \\ = 99,53\%$$

Jadi, dari total anggaran belanja di tahun 2023, pemerintah kota ambon berhasil merealisasikan sebesar 99,53% artinya pemerintah kota ambon berhasil menghemat sekitar 0,47% dari total anggaran belanja tahun 2023.

- Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2024:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.107.398.393.879,00}{1.278.797.555.252,11} \times 100\% \\ = 86,63\%$$

Jadi, dari total anggaran belanja di tahun 2024, pemerintah kota ambon berhasil merealisasikan sebesar 86,63% artinya pemerintah kota ambon berhasil menghemat sekitar 13,37% dari total anggaran belanja tahun 2024.

#### Analisis Pertumbuhan Belanja

- Tahun 2022

Tingkat Pertumbuhan

$$= \frac{1.110.263.638.646,00 - 1.139.662.245.666,16}{1.139.662.245.666,16} \times 100\% \\ = -2,58\%$$

Jadi, tingkat pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Ambon tahun 2022 adalah sekitar -2,58%, yang berarti terjadi penurunan belanja dibandingkan tahun sebelumnya.

- Tahun 2023

Tingkat Pertumbuhan

$$= \frac{1.190.899.358.283,81 - 1.110.263.638.646,00}{1.110.263.638.646,00} \times 100\% \\ = 7,26\%$$

Jadi, tingkat pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Ambon tahun 2023 adalah sekitar 7,26%, yang berarti terjadi peningkatan belanja dibandingkan tahun sebelumnya.

- Tahun 2024

Tingkat Pertumbuhan

$$= \frac{1.107.398.393.879,00 - 1.190.899.358.283,81}{1.190.899.358.283,81} \times 100\% \\ = -7,01\%$$

Jadi, tingkat pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Ambon tahun 2023 adalah sekitar -7,01%, yang berarti terjadi penurunan belanja dibandingkan tahun sebelumnya.

#### 3.2 Pembahasan

##### • Pembahasan Hasil Analisis Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja Pemerintah Kota Ambon selama periode tahun anggaran 2022–2024, terlihat adanya dinamika kinerja keuangan daerah yang cukup beragam dari tahun ke tahun. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja secara optimal, dimana semakin mendekati 100% menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang semakin tinggi.

Pada tahun anggaran 2022, rasio efisiensi belanja Pemerintah Kota Ambon sebesar 92,66%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja telah direalisasikan dengan baik, meskipun masih terdapat selisih antara anggaran dan realisasi sebesar 7,34%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan pengendalian belanja secara relatif efisien, namun masih terdapat program atau kegiatan yang tidak sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan. Efisiensi pada tahun ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya kehati-hatian pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran, terutama dalam memastikan belanja dilakukan sesuai dengan kebutuhan prioritas.

Pada tahun anggaran 2023, rasio efisiensi belanja mengalami peningkatan signifikan menjadi 99,53%. Tingginya tingkat realisasi belanja ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun tersebut berjalan sangat optimal. Selisih antara anggaran dan realisasi yang hanya sebesar 0,47% mencerminkan kemampuan Pemerintah Kota Ambon dalam menyusun anggaran yang realistis serta melaksanakan program dan kegiatan secara tepat sasaran. Kondisi ini juga dapat diartikan bahwa koordinasi antar perangkat daerah serta pengendalian pelaksanaan anggaran semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun demikian, pada tahun anggaran 2024 rasio efisiensi belanja mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 86,63%. Penurunan ini menunjukkan bahwa tidak seluruh anggaran belanja dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan tingkat penghematan mencapai 13,37%. Rendahnya tingkat realisasi belanja pada tahun 2024 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya perubahan kebijakan, penyesuaian



prioritas pembangunan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun kendala administratif dan teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan dapat lebih efektif.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja efisiensi belanja Pemerintah Kota Ambon selama periode 2022–2024 berfluktuasi. Tahun 2023 dapat dikatakan sebagai tahun dengan kinerja efisiensi belanja terbaik, sementara tahun 2024 menunjukkan penurunan tingkat penyerapan anggaran. Temuan ini mengindikasikan pentingnya konsistensi dalam perencanaan anggaran, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kapasitas pelaksanaan program agar efisiensi belanja dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, analisis efisiensi belanja ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di masa mendatang.

#### • **Pembahasan Hasil Analisis Rasio Tingkat Pertumbuhan belanja**

Analisis pertumbuhan belanja merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya perubahan pengeluaran pemerintah dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan belanja memberikan gambaran tentang dinamika kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan aktual dan kondisi perekonomian setempat.

Berdasarkan perhitungan tingkat pertumbuhan belanja Pemerintah Kota Ambon, terlihat adanya fluktuasi yang mencerminkan kondisi fiskal dan strategi pengelolaan keuangan yang berbeda tiap tahunnya. Pada tahun 2022, belanja pemerintah tercatat mengalami penurunan sebesar **2,58%** dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian anggaran atau efisiensi dalam penggunaan dana, namun juga perlu dianalisis apakah penurunan ini berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan.

Tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan belanja sebesar **7,26%** dibanding tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan respons pemerintah terhadap kebutuhan pembangunan yang meningkat atau adanya penyesuaian anggaran untuk memenuhi target program-program strategis. Peningkatan belanja juga dapat menandakan adanya ekspansi kegiatan pemerintah, baik dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, maupun belanja modal. Namun demikian, kenaikan yang signifikan perlu dikaitkan dengan capaian output agar peningkatan belanja tersebut benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Pada tahun 2024, belanja pemerintah mengalami penurunan kembali sebesar **7,01%** dibanding tahun 2023. Penurunan ini menandakan upaya pemerintah dalam mengefisienkan pengeluaran, menyesuaikan belanja dengan kemampuan fiskal, atau adanya pengurangan kegiatan yang dinilai tidak prioritas. Dari perspektif akademis, fluktuasi pertumbuhan belanja ini penting untuk dianalisis karena mencerminkan keseimbangan antara efisiensi penggunaan dana dan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan yang seimbang akan memastikan bahwa pemerintah tetap mampu memenuhi tanggung jawab pelayanan publik, sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan akuntabilitas anggaran.

Secara keseluruhan, analisis pertumbuhan belanja memberikan informasi penting tentang tren pengeluaran pemerintah, baik dari sisi besaran maupun arah alokasinya. Perpaduan analisis rasio efisiensi dan pertumbuhan belanja memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kinerja keuangan daerah, di mana efisiensi menunjukkan sejauh mana anggaran digunakan sesuai rencana, sementara pertumbuhan belanja menyoroti dinamika perubahan anggaran dari tahun ke tahun. Kedua indikator ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih strategis, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh [8] di Jawa Timur, [9] di Medan dan [10] di kabupaten Teluk Wondama di mana efisiensi dan pertumbuhan belanja mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi belanja Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2022 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Ambon selama periode tahun anggaran 2022–2024 ditandai oleh ketidakkonsistenan dalam pengelolaan belanja daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencapaian efisiensi belanja dan dinamika pertumbuhan belanja tidak selalu bergerak searah, sehingga mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perencanaan anggaran dan kapasitas implementasi kebijakan fiskal. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi belanja tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, stabilitas kebijakan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Fluktuasi pertumbuhan belanja yang terjadi selama periode penelitian menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi fiskal dan prioritas pembangunan. Secara konseptual, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa evaluasi kinerja keuangan daerah memerlukan pendekatan

yang komprehensif dengan mengombinasikan indikator efisiensi dan pertumbuhan belanja, sehingga dapat memberikan dasar yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada keberlanjutan fiskal dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, Pemerintah Kota Ambon disarankan untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan mengedepankan prinsip anggaran berbasis kinerja, sehingga alokasi belanja lebih realistis dan selaras dengan kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan anggaran perlu didukung oleh analisis kebutuhan yang komprehensif serta penetapan prioritas pembangunan yang konsisten agar perubahan kebijakan tidak berdampak pada rendahnya realisasi belanja. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada kegiatan strategis yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap keterlambatan dan penyesuaian pelaksanaan.

Pemerintah daerah juga disarankan untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mempercepat proses pelaksanaan belanja. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur pengelola keuangan daerah, menjadi hal yang penting untuk memastikan pemahaman yang memadai terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Di sisi lain, evaluasi terhadap komposisi dan struktur belanja daerah perlu dilakukan secara periodik agar pertumbuhan belanja dapat diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan periode penelitian serta menambahkan variabel lain, seperti efektivitas pendapatan daerah, rasio kemandirian keuangan, dan keserasian belanja, sehingga analisis kinerja keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan mendalam. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan komparatif antar daerah atau metode kuantitatif yang lebih lanjut untuk memperkaya temuan empiris di bidang pengelolaan keuangan daerah.

#### **Daftar Rujukan**

- [1] Halim, “Akuntansi Keuangan Daerah,” Penerbit salemba, 2013.
- [2] Mardiasmo, *Akuntansi sektor publik edisi terbaru*. Penerbit Andi, 2021.
- [3] Kementrian dalam Negeri RI, *Peraturan Menteri dalam Negeri No 77 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah*. Indonesia, 2020.
- [4] Sekretariat Negara, *Peraturan Pemerintah RI No 71 tentang standar Akuntansi Pemerintah*. Indonesia, 2010.
- [5] H. A. Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: BPFE., 2011.
- [6] Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Askara, 2021.
- [7] I. K. D. Kartika, “Jurnal akunida ISSN 2442-3033 Volume 1 Nomor 2, Desember 2015 23 "Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas pad, dan rasio efisiensi pad pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten sukabumi,” vol. 1, pp. 23–34, 2015.
- [8] M. Setyowati, “JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi ),” vol. 8, no. 3, pp. 562–577, 2024.
- [9] A. Syahira, “Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kota Medan,” vol. 4, no. 2, pp. 386–394, 2023.
- [10] T. L. Mandua, C. L. Numberi, S. Werimon, J. Akuntansi, and F. Ekonomi, “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode 2017-2021,” vol. 16, no. 2014, pp. 237–253, 2023.